

MEMBANGKITKAN SEMANGAT MULTIKULTURALISME SEBAGAI BUDAYA POLITIK DI JAWA BARAT

Dede Mariana

Pengantar

Sebagaimana telah diramalkan Alvin Toffler, di tengah arus globalisasi ternyata muncul pula paradoks menguatnya semangat menonjolkan karakter lokalitas. Fenomena ini punya nilai positif, terutama bila dikaitkan dengan era otonomi daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri seluas mungkin. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah menonjolkan kekhasannya sebagai sumber potensi. Namun di sisi lain, era otonomi daerah yang seluas-luasnya juga berdampak negatif bagi lokalitas dengan berkembangnya semangat etnosentrisme dan potensi disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kebijakan yang menonjolkan kepentingan sempit lokalitas tampak mulai dari isu putra daerah, kebijakan transmigrasi yang hanya membuka peluang bagi perpindahan penduduk dalam satu propinsi, sampai dengan upaya mengembalikan simbol-simbol kejayaan kerajaan, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan mengembalikan kedudukan sang raja tapi hanya untuk kepentingan pariwisata, sementara di luar kepentingan pariwisata raja tetap tidak punya kekuasaan apapun.

Efek negatif tersebut tidak terlepas dari penafsiran sempit akan makna kebanggaan lokalitas. Lokalitas hanya dimaknai sebagai ruang kultural tanpa mempertimbangkan lokalitas sebagai suatu ruang politik di mana seluruh orang yang ada dalam lokalitas tersebut (dengan identitas etnis, ras, agama, dan kultur apapun) memiliki hak-hak politik yang sederajat. Maka kebanggaan yang muncul pun menjadi kebanggaan semu yang berdiri di atas kepentingan sempit identitas suatu kelompok elit, tanpa memperhatikan kondisi massa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berbicara mengenai budaya politik macam apa yang ingin dikembangkan di Jawa Barat, kita jangan sampai mengulang kekeliruan yang sama. Berbicara hanya dari perspektif elit tanpa melihat perspektif massa, sehingga budaya politik yang kemudian terbentuk ternyata sekedar mewarisi feodalisme, bahkan terjebak menjadi simbol kultural tanpa makna yang hanya menjanjikan nostalgia bagi sekelompok elit tanpa memberikan suatu keterikatan emosional bagi generasi di masa mendatang. Dari sinilah muncul pertanyaan mengenai pemahaman tentang konsep budaya politik dalam konteks kehidupan politik di Jawa Barat dewasa ini apa relevansinya dengan kondisi masyarakat Jawa Barat dewasa ini yang sangat multikultural ?

Faktor Kepemimpinan dalam Budaya Politik Sunda

Nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Sunda dipengaruhi oleh lingkungan geografis tempat tinggalnya. Secara geografis, bumi Sunda dapat dibedakan menjadi 3 macam medan, yakni dataran rendah pesisir utara yang merupakan sumber terbesar sawah-sawah; dataran tinggi pegunungan yang terbentang dari barat ke timur; dan dataran-dataran

tinggi luas yang terpusat di kota-kota Bogor, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bandung, dan Tasikmalaya.¹

Kondisi geografis ini menentukan sistem sosial dan sistem mata pencaharian hidup orang-orang Sunda. Ada suatu ungkapan dalam masyarakat Sunda yakni *ulah sok parasea bisi pajauh huma*², yang artinya jangan saling bertengkar agar tidak berjauhan rumah. *Huma* dalam ungkapan di atas dapat diartikan sebagai rumah atau ladang sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia Sunda adalah manusia peladang. Budaya peladang adalah budaya nomaden sehingga memiliki mobilitas tinggi dan akibatnya tidak terbentuk struktur sosial yang mapan dalam satu wilayah. Dalam interaksi sosialnya, budaya peladang cenderung melahirkan sikap individualistis yang tercermin dalam ungkapan *hayam diparaban silih acak, silih toker, digiringkeun paburisasi; ari bebek mah galeut bae* (artinya ayam dipelihara saling mencakar dan jika digiring berhamburan, sedangkan bebek jika digiring akan tetap menyatu).³ Berdasarkan ungkapan ini dapat dilihat tipe kepemimpinan dalam masyarakat Sunda dengan karakteristik peladang cenderung ke arah tipe kepemimpinan administrator yang lebih mengutamakan perkembangan ke arah kesejahteraan, bukan mementingkan gotong royong.

Meskipun pada awalnya karakteristik masyarakat Sunda adalah masyarakat peladang, namun setelah terjadinya pembukaan hutan secara besar-besaran oleh orang-orang Jawa (Mataram) sekitar tahun 1575 maka bagian utara daerah Sunda berubah karakteristiknya menjadi daerah persawahan⁴. Karena itu, di bagian utara Sunda berkembang sistem sosial dengan pola kampung yang menetap dan mengelompok. Dengan demikian mereka dapat saling tolong-menolong dalam melakukan berbagai kegiatan sosial sehingga lahirlah konsep gotong royong.

Selain tercermin dalam ungkapan-ungkapan, pola kepemimpinan Sunda juga tercermin dalam naskah-naskah kuno dan tradisi lisan di kalangan masyarakat Sunda. Gagasan tipe kepemimpinan administrator terdapat dalam naskah Siksakandang Karesian pada lembaran 26 dan 27⁵. Dalam lembaran tersebut, berisi suatu ajaran bahwa apabila tiap orang berpedoman pada kebenaran dan menjalankan tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh maka akan tercipta kesejahteraan yang abadi. Demikian pula dalam Prasasti Kawali I dan II, Raja Wastu berwasiat pada para penerusnya agar negara Kawali tetap sejahtera dengan melakukan kebajikan dan memelihara kesejahteraan.

Berdasarkan kedua sumber tertulis ini, nilai-nilai kepemimpinan yang melekat dalam budaya Sunda adalah berpedoman pada kebenaran, bekerja sesuai dengan tugasnya, melakukan kebajikan, dan memelihara kesejahteraan. Dalam penjabaran selanjutnya, nilai-nilai ini dinyatakan dalam sikap-sikap seorang pemimpin yang :

1. *teu adigung kamagungan* (tidak sombong);
2. *titih-rintih, tara kajurung ku nafsu* (tertib, tidak pernah terdorong nafsu);
3. *sacangreud pageuh, sagolek pangkek, henteu ganti pileumpangan* (kukuh pendirian);
4. *leber wawanen* (penuh keberanian) yang diimbangi dengan kepandaian;

¹ Haedar Nashir, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Sunda*. Makalah dalam *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara* (Muhammad Najib – editor). Yogyakarta : LKPSM, 1996, hal. 307.

² Kusnaka Adimihardja, *Kepemimpinan dalam Kebudayaan Sunda*. Makalah. Depdikbud, 1986, hal. 227.

³ *Ibid*, hal. 230.

⁴ *Ibid*, hal. 229.

⁵ *Ibid*, hal. 231.

5. *loba socana rimbil cepilna* (pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah rakyatnya);
6. *kudu boga pikir rangkepan* (waspada);
7. *kudu jadi gunung pananggeuhan* (harus menjadi andalan bagi rakyat).⁶

Dalam berbagai jenis tradisi lisan di kalangan masyarakat Sunda, juga tersirat mengenai gambaran ideal figur seorang pemimpin. Meskipun daerah Sunda merupakan bekas daerah kerajaan, namun gambaran tentang figur pemimpin yang ideal jauh dari sosok yang feodal ataupun sarat dengan unsur kekuasaan seperti kekayaan. Dalam Wangsit Siliwangi, misalnya, figur seorang pemimpin diidentifikasi sebagai gembala (*budak angon*)⁷. Demikian pula, dalam *uga*⁸ (ramalan) Kawasen dinyatakan bahwa seorang pemimpin adalah figur yang sangat sederhana dan merakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah masuknya agama Islam ke daerah Sunda melalui Banten dan Cirebon, nilai-nilai kepemimpinan Sunda mulai dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Karena itu, muncullah figur ideal pemimpin yang dikenal dengan sebutan *Raja Pinandita*⁹ yang merupakan perbandingan antara pejabat negara (*umaro*) dan ulama (maksudnya memiliki pengetahuan dan penghayatan yang memadai mengenai keagamaan).

Kesederhaan konsep kepemimpinan dan figur pemimpin dalam nilai-nilai adat Sunda ini bersumber dari pandangan hidup orang Sunda yang berusaha mengambil jalan tengah (*sineger tengah*)¹⁰, yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan yang seimbang dan berkecukupan, tidak kekurangan ataupun tidak berlebihan. Pandangan ini bisa mengandung aspek positif sekaligus aspek negatif. Positifnya, pandangan hidup ini menyebabkan orang Sunda tidak menonjolkan diri, tapi negatifnya, sikap seperti ini dapat diartikan sebagai orang yang tidak berani mengambil resiko dalam mempertahankan sesuatu.

Permasalahan aktual yang menjadi bahan diskusi di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan budayawan, agamawan, akademisi, bahkan politisi adalah munculnya kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa orang Sunda suatu ketika mungkin akan kehilangan identitas ke-Sunda-annya, seperti halnya orang Betawi di Jakarta yang terpinggirkan di tengah pesatnya pembangunan. Kekhawatiran ini timbul karena secara kultural, etnis Sunda berlatar belakang budaya masyarakat peladang sehingga sulit bersatu, tidak memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, dan memiliki prinsip yang cenderung selalu mengalah (*ngelehan*).

Sementara figur pemimpin formal yang diharapkan dapat menampilkan nilai-nilai Sunda dalam pola kepemimpinan tidak mampu mempertahankan legitimasinya di mata masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada figur pemimpin ini tersirat dari sinyalemen bahwa Bandung dirusak bukan hanya oleh pendatang tapi juga oleh kebijakan

⁶ Nina H. Lubis, *Sejarah dan Budaya Politik*. Bandung : Satya Historika, 2002, hal. 227 – 228.

⁷ Adimihardja, *Op.Cit*, hal. 232

⁸ Uga dikenal di kalangan masyarakat agraris-tradisional sebagai ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memahami tanda-tanda zaman sehingga seringkali dianggap sebagai ramalan, seperti halnya ramalan Joyoboyo (Nina Lubis, *Op.Cit*, hal. 230). Uga Kawasen dari daerah Ciamis berbunyi : *ari nu bakal jadi ratu, baju butut babadong batok, banderana karakas cau* (artinya yang akan menjadi ratu/penguasa, berbaju rombeng, menggunakan topi tempurung, dan berbendera daun pisang kering).

⁹ Atang Ruswita, *Kuda Belang*. Artikel dalam *Pikiran Rakyat*, 1 Agustus 2002.

¹⁰ Lubis, *Op.Cit*, hal. 216

pemerintah setempat. Beberapa kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan, antara lain pembangunan jalan layang Pasteur-Surapati yang menyebabkan ditebangnya beratus-ratus pohon berusia tua, pembongkaran gedung-gedung arsitektur Belanda yang mengandung nilai historis, dan kebijakan tata ruang kawasan Bandung Utara yang justru menghancurkan sumber air tanah.

Hubungan antara masyarakat dengan figur-figur pemimpin formal mengalami perubahan. Sebagai tingkat tertinggi dalam jabatan eksekutif di daerah, kepemimpinan kepala daerah menjadi figur yang diharapkan mampu mempersatukan warganya dan meredam timbulnya konflik. Akan tetapi, dalam banyak kasus, kepemimpinan kepala daerah dan juga elit-elit politik lainnya di parpol atau DPRD justru menerapkan pendekatan konflik dalam melaksanakan sejumlah kebijakannya atau justru memunculkan perilaku yang tidak pantas diteladani dalam kaitannya dengan etika politik.

Pola kepemimpinan dari figur pemimpin formal yang berasal dari Sunda ternyata dirasakan tidak mampu menampilkan nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang bercirikan perilaku yang *someah*, *boga tata-titi duduga peryoga*, *hade gogog hade togog* (artinya ramah, memakai aturan, baik budi bahasa, sikap maupun tingkah laku). Secara tidak langsung, krisis kepemimpinan lokal ini turut mempengaruhi pergeseran figur ideal pemimpin formal yang diharapkan masyarakat. Figur ideal pemimpin formal tidak lagi harus putra daerah asli tapi figur yang *nyunda*, figur yang mempunyai komitmen untuk melestarikan nilai-nilai yang bersumber pada budaya Sunda.

Jalan menuju Budaya Politik Multikulturalis di Jawa Barat

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ide multikulturalisme pada dasarnya adalah gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Sebagai sebuah gagasan dan ideologi, multikulturalisme akan sangat terkait erat dengan berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yakni politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, bahkan juga tingkat dan mutu produktivitas¹¹. Dengan demikian, membicarakan multikulturalisme tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ide multikulturalisme pada dasarnya adalah gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Lebih jauh lagi, gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok migran, masyarakat adat, dll. Wacana multikulturalisme muncul sebagai respon terhadap kegagalan teoretisasi demokrasi dalam menjawab pertanyaan bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok

¹¹ Parsudi Suparlan. "Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural". *Makalah* disampaikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3 di Universitas Udayana Bali, 16-19 Juli 2002.

etnik-kultural¹². Dalam konsep multikulturalisme, masyarakat dipandang memiliki kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Dalam mosaik tersebut, tercakup semua kebudayaan dari setiap kelompok etnik yang membentuk masyarakat tersebut. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa suatu masyarakat adalah beragam dan majemuk. Namun, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal.

Secara kultural, karakteristik masyarakat Jawa Barat sangat beragam meski secara umum sering disebut sebagai masyarakat Sunda. Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragaman masyarakat Jawa Barat semakin bertambah, tidak hanya dari dimensi kultural namun juga dimensi identitas (ras, etnisitas, agama). Dalam kondisi seperti inilah konsep multikulturalisme memperoleh relevansinya. Wacana multikulturalisme menjadi relevan manakala berhadapan dengan realitas kehidupan sosial di Jawa Barat yang semakin hari semakin kosmopolis. Jawa Barat tidak sekedar menjadi milik etnik Sunda semata, tapi juga menjadi tanah tempat bermukim dan berkarya berbagai etnik bahkan bangsa.

Sementara secara politik, karakter budaya politik Sunda cenderung menempatkan elit secara dominan dalam pengambilan keputusan, sementara karakter masyarakat Sunda kendati menunjukkan ciri masyarakat yang egaliter (sederajat), namun secara kultural masyarakat Sunda cenderung menunjukkan partisipasi politik yang individualistis¹³. Kondisi ini memberi peluang kepada pemegang otoritas politik untuk tidak memedulikan kepentingan politik mayoritas masyarakat. Dalam batas tertentu, masyarakat Sunda memang memperlihatkan ciri egaliter tetapi dalam egaliterianisme ini justru muncul sifat-sifat individualistis dalam persoalan yang menyangkut kepentingan pribadi. Dalam kondisi demikian, apatisisme atau ketidakacuhan politik kerap tampak ke permukaan. Kondisi ini semakin memperlebar peluang pemegang otoritas politik untuk mengesampingkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Perilaku politik mereka akhirnya juga bercirikan individualistis sebab tidak ada *pressure* signifikan secara kolektif dari masyarakat ketika kepentingan mereka tidak terakomodasi sepenuhnya.

Dalam konteks yang berbeda, masyarakat Jawa Barat ditandai juga oleh fragmentasi sosial-ekonomi yang berpotensi memicu konflik horisontal. *Setting* ekonomi turut menjadi penyebab munculnya kesenjangan sosial, yang seringkali berhimpitan dengan identitas etnisitas. Isu-isu mengenai hubungan antara migran dengan penduduk asli dan isu kepemilikan sumberdaya di daerah oleh etnik tertentu, misalnya, menjadi salahsatu sumber konflik laten dalam pengelolaan otonomi daerah.

Dalam kondisi kontemporer inilah, gagasan multikulturalisme dimunculkan sebagai alternatif dalam mengelola keberagaman, sehingga keberagaman dapat menjadi aset yang menunjang pengelolaan otonomi daerah. Secara konkret, pengadopsian multikulturalisme seyogianya tercermin dalam substansi setiap kebijakan publik yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah.

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan budaya politik multikulturalis di Jawa Barat adalah menemukan kembali nilai-nilai lokal, kemudian menginventarisasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Jawa Barat, baik dalam bidang politik, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, dsb untuk selanjutnya mencoba

¹² Will Kymlicka. 2001. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : LP3ES.

¹³ Budi Radjab dalam *Pikiran Rakyat*, 11 Juni 2003.

menerapkan nilai-nilai budaya tersebut untuk mencari alternatif penanganan permasalahan tersebut. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sunda tersebut, diperlukan suatu strategi budaya bukan hanya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya Sunda tapi juga mengarahkan revitalisasi tersebut untuk mewujudkan Jawa Barat yang multikultural. Sebuah tempat bagi beragam manusia dari etnis berbeda-beda namun tetap diikat oleh nilai-nilai ke-Sunda-an sebagai dasar perilakunya.

Komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri masyarakat Jawa Barat dewasa ini tidaklah berarti terjadinya ketercerabutan dari akar budaya lokal (Sunda) karena pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tersebut. Dalam karakter masyarakat yang mengarah pada kosmopolitanisme, multikulturalisme menjadikan pola interaksi dan identifikasi diri menjadi bersifat multi sehingga seseorang tidak hanya merasa diri sebagai orang Sunda karena dia dilahirkan dari orang tua beretnis Sunda, tapi lebih dari itu, seorang yang bukan etnis Sunda tapi lahir di Bandung pun bisa merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Sunda.

Pengalaman mengajarkan, bukan semangat kemandirian atau ketunggalan yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat dan kemajuan suatu masyarakat, tetapi pengakuan adanya pluralitas budaya inilah yang lebih menjamin tercapainya visi dan misi Jawa Barat menuju pembaruan sosial yang demokratis. Di samping itu, yang perlu kita jadikan standar secara kolektif dalam suatu komunitas sosial kehidupan bermasyarakat adanya “keajekan sosial” (*social consistency*) yang sama-sama kita miliki. “Keajekan sosial” tersebut berupa sistem nilai sosial, seperti etika yang harus kita sepakati dan taati secara bersama-sama oleh suatu masyarakat yang multikultural. Hal demikian akan memungkinkan realitas sosial yang multikultural tidak akan mudah terjebak dalam sebuah konflik-konflik komunal yang merugikan semua pihak. Dengan semangat multikulturalisme, perbedaan hendaknya dipahami sebagai aset dan bukan sebagai pemicu konflik, apalagi dimanipulasi sebagai alat pertarungan kekuasaan.

Dalam konteks ini, model *local good governance* yang menyangkut konsepsi mengenai praktik relasi kekuasaan yang didasari oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan, partisipasi, pertanggungjawaban, penegakan hukum, kemitraan yang sinergis, pengembangan jejaring kerja, dll. perlu menjadi orientasi untuk mengarahkan pertumbuhan budaya politik di Jawa Barat. Praktik relasi kekuasaan yang egalitarian merupakan refleksi dari pola relasi kekuasaan khas Sunda yang tidak mengenal adanya kekuasaan yang memusat. Nilai kesetaraan dan pola kepemimpinan yang egalitarian perlu menjadi titik fokus yang perlu direvitalisasi dalam merancang ulang praktik tata pemerintahan lokal yang baik di Jawa Barat.

Kondisi masyarakat Jawa Barat yang multikultural hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendorong bagi munculnya kreativitas dan inovasi yang pada gilirannya akan mendukung percepatan pencapaian visi dan misi sebagai provinsi termaju dan mitra terdepan ibukota negara.

Bandung, 9 Juni 2006